



newsletter

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
Tanhana Dharmma Mangrva | Edisi 202 Mei 2026



Versi Digital

Laksdya TNI Erwin S Aldedharma Resmi Dilantik Sebagai Wakil Gubernur Lemhannas RI



Lemhannas RI Gelar KPPD Ketua DPRD Seluruh Indonesia Guna Membangun Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah



Lemhannas RI dan KPK Perkuat Integritas Peserta P4N Angkatan 69



Lemhannas RI Soroti Darurat Sampah Nasional dan Penguatan Pengelolaan Berbasis Komunitas

Biro Humas Settama Lemhannas RI
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat, 10110
Email: redaksihumaspubbit@gmail.com

Daftar Isi

- 2 P4N 69 Lemhannas RI Dalam Transformasi Kekuatan Udara Nasional di Era Ancaman Multidomain
- 3 Wakasal Paparkan Strategi Penguatan Kekuatan Maritim Nasional di Era Kontestasi Kawasan
- 4 Gubernur Lemhannas RI Terima Audiensi KPID Jawa Barat Bahas Ketahanan Siber dan Penguatan Regulasi Digital
- 5 Lemhannas RI Gelar KPPD Ketua DPRD Seluruh Indonesia Guna Membangun Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah
- 6 Lemhannas RI Bahas Strategi Pemerataan Ekonomi di Tengah Ketimpangan Pembangunan Daerah
- 7 Lemhannas RI Selenggarakan FGD Harmonisasi Kebijakan Keamanan Laut
- 8 Lemhannas RI Dorong Birokrasi Bersih, Profesional & Berintegritas Tinggi Melalui Monitoring LHKAN, LHKPN & SPIP
- 9 Lemhannas RI dan Canadian Defence College Bahas Kebijakan dan Modernisasi Pertahanan
- 10 Lemhannas RI dan KPK Perkuat Integritas Peserta P4N Angkatan 69
- 11 Lemhannas RI dan Kedutaan Besar Jepang Bahas Penguatan Kerja Sama Strategis
- 11 Laksdya TNI Erwin S Aldedharma Resmi Dilantik Sebagai Wakil Gubernur Lemhannas RI
- 12 Lemhannas RI Soroti Darurat Sampah Nasional dan Penguatan Pengelolaan Berbasis Komunitas

Redaksi

Penanggung Jawab **Muhammad Arif Nur**
Redaktur **Hendra Setiawan**
Penyunting/Editor **Bambang Iman Aryanto**
Pembuat Artikel **Naomi Augustina, Sucitra Puteri, Angga Mitra Tama**
Penerjemah **Magista Dian Fitrilia, Dwi Ariyani**
Desain Grafis **Arini Maulidia**
Fotografer **Wia Yunia Putri**
Sekretariat **Maulida Arbaningsih**

Alamat Redaksi

Biro Humas Settama Lemhannas RI,
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10,
Jakarta Pusat, 10110

Telp. (021) 3832470
Email redaksihumaspubbit@gmail.com
Instagram: [@lemhannas_ri](https://www.instagram.com/lemhannas_ri)
Facebook: [@lembagaketahanannasionalri](https://www.facebook.com/lembagaketahanannasionalri)
Twitter: [@LemhannasRI](https://twitter.com/LemhannasRI)
Youtube: [Lemhannas RI](https://www.youtube.com/LemhannasRI)
TikTok: [@lemhannas_ri](https://www.tiktok.com/@lemhannas_ri)

P4N 69 Lemhannas RI Dalam Transformasi Kekuatan Udara Nasional di Era Ancaman Multidomain



JAKARTA - Peserta Program Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan ke-69 Lemhannas RI menerima ceramah mengenai kebijakan pembinaan kekuatan TNI Angkatan Udara di era modern yang disampaikan Panglima Komando Operasi Udara Nasional, Marsdya TNI Minggit Tribowo, S.I.P., di Ruang NKRI pada Rabu (8/4).

Dalam paparannya, Minggit Tribowo menjelaskan bahwa perkembangan teknologi, dinamika geopolitik, serta pola ancaman modern menuntut kesiapan pertahanan yang mampu bergerak cepat dan terkoordinasi dalam berbagai domain operasi.

"Saya berharap pembekalan ini dapat memberi perspektif bagi Bapak dan Ibu sekalian, bahwa pembangunan kekuatan udara bukan semata-mata isu satu matra, melainkan bagian penting dari bangunan ketahanan nasional," ungkap Minggit Tribowo.

Secara umum, pembinaan kekuatan TNI AU difokuskan pada modernisasi alutsista, penataan dan penguatan organisasi, pengembangan doktrin

dan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta dukungan terhadap kebijakan nasional. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kesiapan TNI AU dalam menghadapi tantangan pertahanan di masa mendatang yang semakin dinamis dan multidimensional.

Selain penguatan internal, Minggit Tribowo juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam membangun kekuatan udara nasional. Kolaborasi antara TNI AU dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dunia pendidikan, serta sektor industri dinilai menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem pertahanan yang kuat dan berkelanjutan.

Melalui ceramah tersebut, peserta P4N Angkatan ke-69 diharapkan mampu memahami bahwa pembangunan kekuatan udara merupakan bagian dari upaya bersama dalam memperkuat ketahanan nasional serta dapat berkontribusi sesuai bidang pengabdian masing-masing.

Wakasal Paparkan Strategi Penguatan Kekuatan Maritim Nasional di Era Kontestasi Kawasan

Rabu

08

4/2026

JAKARTA - Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal), Laksdya TNI Edwin, S.H., M.Han., M.H., menyampaikan ceramah kepada peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan ke-69 Lemhannas RI di Gedung Pancagatra-Jakarta pada Rabu (8/4). Pada kesempatan tersebut, Edwin memaparkan materi bertajuk "Kebijakan Pembinaan Kekuatan TNI AL di Era Modern".

"Membangun kekuatan TNI AL bukan sekedar pilihan, melainkan sebuah keniscayaan strategis. Pembinaan kekuatan TNI AL bukan sekedar kebutuhan organisasi melainkan, agenda strategis nasional," ujar Edwin.

Menurut Edwin, terdapat tiga hal mendasar yang menempatkan laut sebagai determinan masa depan bangsa. Pertama, laut menjadi ruang kontestasi strategis yang ditandai rivalitas *major powers*, akselerasi teknologi militer, militerisasi kawasan, dan aktivitas grey zone. Kedua, laut merupakan ruang mutlak bagi kedaulatan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar yang berada di persilangan dua samudra. Ketiga, pembinaan kekuatan TNI AL harus dipandang sebagai instrumen vital dalam mewujudkan visi poros maritim dunia.

Lebih lanjut, Edwin menyampaikan sejumlah tantangan dalam pengamanan yurisdiksi laut, yakni

penguatan *sea control*, *sea denial*, *maritime security*, dan *naval diplomacy*, serta meningkatnya kontestasi di kawasan strategis seperti Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), *choke points*, dan perbatasan Natuna.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, TNI AL melaksanakan berbagai upaya, antara lain melalui

kendali ruang laut, integrasi sensor untuk *common operational picture*, pembangunan pangkalan ajut guna mendukung respons cepat dan pencegahan, pemfokusan anggaran pada pemeliharaan dan *life cycle support*, pelaksanaan operasi maritim terpadu, serta penguatan kapasitas alutsista.



Gubernur Lemhannas RI Terima Audiensi KPID Jawa Barat Bahas Ketahanan Siber dan Penguatan Regulasi Digital

Senin
13
4/2026



JAKARTA - Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. menerima audiensi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat di Gedung Trigatra-Jakarta pada Senin (13/4). Audiensi tersebut dihadiri jajaran komisioner KPID Jawa Barat yang dipimpin Ketua KPID Jawa Barat Dr. Adiyana Slamet.

Dalam pertemuan tersebut, KPID Jawa Barat menyampaikan sejumlah perkembangan terkait

dinamika media digital dan tantangan ketahanan ideologi di ruang siber. Menurut Dr. Adiyana Slamet, negara perlu hadir secara lebih kuat dalam ruang siber guna melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif transformasi digital, khususnya di wilayah Jawa Barat.

Menyambut baik audiensi tersebut, Gubernur Lemhannas RI menegaskan bahwa ketahanan nasional bukan hanya menjadi

tanggung jawab militer, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Ia menilai ruang siber saat ini menjadi salah satu medium paling rentan terhadap berbagai bentuk penetrasi ideologi dan pengaruh global.

“Geo sibernetik itu mengasumsikan bahwa negara itu dalam konteks siber kan borderless, tidak ada batas, maka di situlah kita kenalkan kedaulatan siber kita,” ujar Gubernur Lemhannas RI.

Gubernur Lemhannas RI juga menekankan pentingnya regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan arus informasi yang berlangsung sangat cepat. Menurutnya, transformasi media yang semakin beragam menuntut negara tidak hanya responsif, tetapi juga mampu mengantisipasi berbagai dampak yang mungkin muncul di masa depan.

Menutup audiensi, KPID Jawa Barat mengajak Lemhannas RI untuk berkolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan mahasiswa, stasiun televisi, dan radio di Jawa Barat dalam konteks penguatan ketahanan nasional. Kolaborasi tersebut dipandang sebagai langkah strategis di tengah transformasi digital untuk melindungi masyarakat dari berbagai potensi ancaman sekaligus memperkuat ketahanan nasional.

Lemhannas RI Gelar KPPD Ketua DPRD Seluruh Indonesia Guna Membangun Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah

Rabu
15
4/2026

MAGELANG - Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) menyelenggarakan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) bagi Ketua DPRD se-Indonesia di Akademi Militer, Magelang, pada 15–19 April 2026.

Setelah upacara penyambutan pada Rabu (15/4), kegiatan resmi dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. pada Kamis (16/4). KPPD mengangkat tema “Memperkuat Peran Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Guna Mendukung Asta Cita Menyongsong Indonesia Emas 2045” dan diikuti 503 peserta yang terdiri dari Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia serta pengurus Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa situasi global yang penuh ketidakpastian telah memengaruhi kompleksitas ekonomi dunia yang semakin dinamis dan tidak menentu. Kondisi itu menuntut kepemimpinan yang tidak hanya kuat secara administratif, tetapi juga mampu membaca arah perubahan geopolitik global dan menentukan langkah strategis bagi masa depan bangsa.

Presiden Prabowo Subianto, lanjutnya, telah menetapkan arah pembangunan nasional melalui visi Asta Cita yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029 sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Dalam pelaksanaannya, DPRD

dipandang memiliki peran strategis dalam mengawal sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.

“Di tengah dinamika yang semakin kompleks, pimpinan DPRD dituntut untuk tidak hanya menjadi pengelola kebijakan, tetapi juga arsitek perubahan yang mampu menjembatani kebijakan pusat dan daerah,” ujar Gubernur Lemhannas RI.

Gubernur Lemhannas RI juga berharap KPPD dapat mempererat kolaborasi antarpimpinan DPRD sekaligus menyelaraskan kebijakan daerah dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.



Lemhannas RI Bahas Strategi Pemerataan Ekonomi di Tengah Ketimpangan Pembangunan Daerah

Kamis
16
4/2026

JAKARTA - Direktorat Pengkajian Ekonomi dan Sumber Kekayaan Alam (SKA) Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Jangka Panjang (KJP) bertema “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas untuk Mewujudkan Keadilan dan Pemerataan Kesejahteraan Rakyat” di Gedung Astagatra-Jakarta pada Kamis (16/4).

Dalam sambutannya, Plt. Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Mayjen TNI (Mar) Ipung Purwadi, M.M. menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia masih menunjukkan capaian yang cukup kuat di tengah dinamika

global. Namun, tantangan terkait ketimpangan antarwilayah dan kualitas pertumbuhan ekonomi tetap perlu menjadi perhatian.

“Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu mendistribusikan manfaatnya secara merata kepada seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Melalui forum ini, Lemhannas RI mendorong perumusan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

FGD turut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai sektor, antara lain Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Prof. Raksaka Mahi, M.A., Ph.D., Direktur Perencanaan Fiskal, Moneter, dan Sektor Keuangan Bappenas RI Tari Lestari, S.Si., S.E., M.S., Peneliti Senior Lembaga Demografi FEB UI Turro Selrits Wongkaren, S.E., M.A., Ph.D., Direktur Ekonomi Digital CELIOS Nailul Huda, Director of Policy & Program Indonesian Business Council Prayoga Wiradisuria, serta Anggota Dewan Ekonomi Nasional Prof. Arief Anshory Yusuf, S.E., M.Sc., Ph.D.



Lemhannas RI Selenggarakan FGD Harmonisasi Kebijakan Keamanan Laut

Selasa

21

4/2026



JAKARTA - Kedeputan Pengkajian Strategik Lemhannas RI menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Urgent dan Cepat (Jurpat) tentang "Harmonisasi Kebijakan Keamanan Laut Guna Meningkatkan Keamanan Maritim Nasional" di Ruang Kresna Lemhannas RI pada Selasa (21/4). FGD tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si.

"Dalam beberapa tahun terakhir, pembahasan mengenai keamanan laut bukan lagi sekedar persoalan pertahanan, melainkan menjadi penggerak bagi keberlangsungan aktivitas ekonomi maritim, konektivitas nasional, ketahanan sumber daya alam, serta reputasi diplomatik Indonesia di kawasan dan dunia," kata Gubernur Lemhannas RI mengawali sambutannya.

Melalui FGD tersebut, Lemhannas RI turut berpartisipasi dalam sumbangsih pemikiran mengenai harmonisasi kebijakan keamanan laut guna meningkatkan keamanan maritim nasional. Rekomendasi yang dirumuskan dari diskusi hari ini diharapkan dapat mendorong adanya harmonisasi dalam perumusan kebijakan keamanan laut sehingga dapat menguatkan keamanan maritim nasional, sebagai bagian integral dari penguatan ketahanan nasional kita.

FGD yang difasilitasi oleh Tenaga Profesional Bidang Ketahanan Nasional dan Wawasan Nusantara Lemhannas RI Dr. Margaretha Hanita, S.H., M.Si menghadirkan beberapa narasumber. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dr. Dave

A.F. Laksono, M.E. sebagai narasumber pertama membahas tentang Hambatan dan Strategi Penyelesaian RUU Keamanan Laut.

Adapun beberapa narasumber lain yang hadir pada FGD tersebut, yakni Guru Besar Universitas Pertahanan RI Laksamana TNI (Purn) Prof. Marsetio, Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) RI Laksda Bakamla Samuel H. Kowaas, M.Sc., CSBA., Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M, Ph.D, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan DAN Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., M.M.



Lemhannas RI Dorong Birokrasi Bersih, Profesional & Berintegritas Tinggi Melalui Monitoring LHKAN, LHKPN & SPIP

Kamis

23

4/2026

JAKARTA - Lembaga Ketahanan Republik Indonesia (Lemhannas RI) menyelenggarakan kegiatan Monitoring Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) & Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta Monitoring Pelaksanaan Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Lemhannas RI pada di Ruang Airlangga, pada Kamis (23/4). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Lemhannas RI untuk mewujudkan tata kelola organisasi berjalan secara transparan, akuntabel dalam penyampaian laporan harta kekayaan, baik melalui mekanisme LHKPN maupun LHKAN.

"Pelaporan ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan wujud nyata dari komitmen integritas kita bersama dalam mencegah praktik korupsi serta menjaga marwah institusi agar tetap menjadi birokrasi yang bersih, profesional, dan berintegritas tinggi dalam melayani masyarakat," kata Inspektur Lemhannas RI Brigjen Pol Udin Zainudin, S.I.K., M.H. mengawali sambutannya. Ia juga mengingatkan bahwa pelaporan tersebut bukan sekadar kewajiban formal, tetapi sebagai bukti nyata dari komitmen bersama dalam mencegah praktik korupsi serta memperkuat budaya integritas.

Udin Zainudin menyampaikan harapannya agar seluruh unit kerja

dapat lebih aktif mendukung pencapaian target reformasi birokrasi. "Melalui kegiatan ini saya mengharapkan, penyampaian wajib lapor LHKPN dan LHKAN mencapai 100 persen sebelum batas akhir pelaporan, kemudian terkait pelaksanaan SPIP diharapkan kepada seluruh unit kerja untuk mendukung secara optimal pencapaian nilai reformasi birokrasi Lemhannas RI," ujar Udin Zainudin.

Dengan kegiatan tersebut, diharapkan seluruh jajaran Lemhannas RI tidak hanya menjalani kewajiban institusional, tetapi juga menjalani tanggung jawab bersama dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani.

Lemhannas RI dan Canadian Defence College Bahas Kebijakan dan Modernisasi Pertahanan

Rabu
22
4/2026

JAKARTA - Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) menerima kunjungan delegasi Canadian Defence College di Gedung Tri Gatra-Jakarta, Rabu (22/4). Delegasi dipimpin Kolonel David Shayne Elder dan diterima oleh Tenaga Profesional Bidang Geopolitik Lemhannas RI Edy Prasetyono, S.Sos., MIS., Ph.D.

Pertemuan membahas lingkungan strategis serta arah modernisasi pertahanan Kanada. Delegasi menjelaskan bahwa kebijakan keamanan Kanada sangat dipengaruhi oleh faktor geografis, demografi, ekonomi, dan hubungan internasional.

"Geografi dan ekonomi Kanada secara langsung membentuk cara

negara ini memahami keamanan dan menentukan arah kebijakan pertahanannya," ujar David Shayne.

Seiring dinamika global, Kanada meningkatkan modernisasi pertahanan melalui investasi pada Canadian Armed Forces. Sektor pertahanan negara tersebut mencakup sekitar 600 perusahaan dan berkontribusi lebih dari 9,6 miliar dolar AS terhadap PDB serta menyerap sekitar 81.200 tenaga kerja.

Dalam diskusi, Edy Prasetyono menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam menghadapi tantangan global.

"Kerja sama tidak hanya terbatas pada aspek militer, tetapi juga harus

mencakup dimensi budaya, politik, dan ekonomi," ujarnya.

Pertemuan ini menunjukkan bahwa pendekatan keamanan saat ini semakin bergeser ke arah multidimensi, tidak hanya berbasis kekuatan militer, tetapi juga pada faktor struktural dan kolaborasi lintas sektor.

Pada kesempatan tersebut turut hadir Tenaga Ahli Pengajar Madya Bidang Hubungan Internasional Brigjen TNI (Mar) Raja Erjan H.S. Girsang, S.E., M.M., M.Sc., Tenaga Ahli Pengkaji Madya Bidang Pertahanan dan Keamanan Brigjen TNI Agus Muchlis Latif, S.I.P., M.M., dan perwakilan peserta pendidikan P4N 69 Lemhannas RI.



Lemhannas RI dan KPK Perkuat Integritas Peserta P4N Angkatan 69

Rabu
22
4/2026



JAKARTA - Peserta Program Pendidikan Penyiapan dan Pematapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan 69 Lemhannas RI mengikuti pelatihan penguatan integritas dan antikorupsi yang diselenggarakan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada (22–23/4).

Kegiatan diawali dengan pengarahan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto yang menekankan prinsip utama bagi calon pimpinan nasional. Pertama, integritas yang tercermin dalam keselarasan antara pikiran, ucapan, dan tindakan. “Apa yang di dalam hati, pikiran, ucapan, selaras dengan apa yang dikerjakan,” ujarnya. Kedua, dedikasi untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ketiga,

objektivitas dalam pengambilan keputusan serta menghindari konflik kepentingan. Keempat, loyalitas terhadap konstitusi, bangsa, negara, dan masyarakat. Kelima, amanah dalam menjalankan tanggung jawab.

Di kesempatan yang sama Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. menyampaikan bahwa integritas merupakan bagian dari kurikulum utama pendidikan Lemhannas. Kehadiran KPK dalam program ini ditujukan untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai pentingnya nilai antikorupsi dalam kepemimpinan.

“Sebagai pimpinan nasional penting sekali memiliki integritas, skill saja tidak cukup. Kalau kita memiliki integritas mengabdikan bagi bangsa dan

negara, negara kita akan menjadi negara yang maju,” ujarnya.

Pada hari pertama, peserta menerima materi tentang integritas kepemimpinan dari Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana, dilanjutkan dengan diskusi studi kasus. Di hari kedua, peserta melakukan studi visitasi ke Gedung Merah Putih KPK dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (Rupbasan) KPK. Melalui kegiatan ini, Lemhannas RI menekankan pentingnya integritas sebagai fondasi kepemimpinan nasional dalam menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan.

Lemhannas RI dan Kedutaan Besar Jepang Bahas Penguatan Kerja Sama Strategis

Jumat
24
4/2026



JAKARTA - Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. menerima audiensi Direktur Bagian Politik Kedutaan Besar Jepang di Indonesia Tanaka Motoyasu di Gedung Tri Gatra-Jakarta, Jumat (24/4).

Dalam pertemuan tersebut, Tanaka Motoyasu menyampaikan undangan

dari Pemerintah Jepang terkait rencana kunjungan Gubernur Lemhannas RI ke Jepang.

Pembahasan juga mencakup aspek teknis kunjungan, termasuk agenda pertemuan dengan sejumlah institusi pemerintah Jepang dan kemungkinan diskusi dengan

akademisi serta cendekiawan Indonesia yang berada di Jepang.

Selain itu, rencana kunjungan akan disinergikan dengan kegiatan studi strategis peserta pendidikan Lemhannas RI yang juga dijadwalkan mengunjungi berbagai institusi di Jepang.

"Tentu harapan kedepannya kerjasama antara Indonesia dengan Jepang dalam hal ini, Lemhannas bisa lebih dekat lagi," ujar Gubernur Lemhannas RI.

Pertemuan ini mencerminkan upaya kedua pihak dalam memperkuat hubungan Indonesia-Jepang melalui kolaborasi strategis, pertukaran pemikiran, serta pengembangan kerja sama lintas sektor yang mendukung ketahanan nasional.

Laksdya TNI Erwin S Aldedharma Resmi Dilantik Sebagai Wakil Gubernur Lemhannas RI

Selasa
28
4/2026

JAKARTA - Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB Ace Hasan Syadzily, M.Si. secara resmi melantik Laksdya TNI Erwin S. Aldedharma, S.E., M.M., M.Sc. sebagai Wakil Gubernur Lemhannas RI di Ruang Hening, Gedung Trigatra-Jakarta, pada Selasa (28/4).

Pelantikan Erwin Aldedharma didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 42/TPA Tahun 2026 tanggal 15 April 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI dan Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 92 Tahun 2026 tanggal 23 April 2026 tentang Pengangkatan Jabatan Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

"Saya meyakini, amanah yang diberikan kepada saudara merupakan hasil dari komitmen saudara dalam pengabdian kepada bangsa dan negara selama ini," ujar Gubernur Lemhannas RI mengawali sambutannya. Gubernur Lemhannas RI berharap agar momentum



pelantikan ini dijadikan titik awal untuk memberikan kontribusi terbaik melalui kerja yang profesional, adaptif, dan berintegritas tinggi.

Lebih lanjut, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa tugas Wakil Gubernur Lemhannas RI bukan hanya sebatas pada ruang lingkup administratif, namun lebih bersifat strategic leadership. Wakil Gubernur Lemhannas RI diharapkan dapat mengawal kualitas dan arah pendidikan kader pimpinan nasional agar adaptif terhadap dinamika global, memperkuat fungsi Lemhannas RI sebagai

lembaga think tank strategis negara, mengintegrasikan perspektif geopolitik dalam setiap rekomendasi kebijakan serta memastikan bahwa nilai-nilai kebangsaan tetap menjadi fondasi utama dalam menghadapi dinamika dan tekanan global.

"Saudara diharapkan mampu menghubungkan pemikiran strategis dengan aksi kebijakan, serta menjembatani antara kepentingan nasional jangka panjang dengan dinamika global jangka pendek," tegas Gubernur Lemhannas RI.



Lemhannas RI Soroti Darurat Sampah Nasional dan Penguatan Pengelolaan Berbasis Komunitas

Kamis
30
4/2026

JAKARTA - Kedeputan Pengkajian Strategik Lemhannas RI menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Urgent dan Cepat tentang "Revitalisasi Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas Untuk Meningkatkan Nilai Tambah dalam Rangka Penguatan Ketahanan Nasional" di Ruang Kresna pada Kamis (30/4). FGD tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Lemhannas RI Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi, tantangan, serta potensi revitalisasi pengelolaan sampah berbasis komunitas di Indonesia termasuk bagaimana upaya tersebut dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi, memperkuat partisipasi

masyarakat, serta berkontribusi terhadap penguatan ketahanan nasional dari aspek sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan.

"Saya berharap diskusi ini memiliki dan menghasilkan rekomendasi strategis, tidak hanya pada level aksi pemerintah tapi juga bisa mendorong semua pihak untuk terlibat dalam meningkatkan atau melakukan revitalisasi pengelolaan sampah berbasis komunitas sehingga memiliki nilai tambah yang dapat memperkuat ketahanan nasional kita," kata Gubernur Lemhannas RI.

FGD tersebut difasilitasi oleh Direktur Pengkajian Sosial Budaya dan Demografi Brigjen Pol Yusuf Hondawantri Naibaho, S.H., M.Si.,

M.H. Bertindak sebagai narasumber pertama, yakni PLT. Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Kementerian Lingkungan Hidup RI Dra. Melda Mardalina, M.Sc.

Adapun narasumber lain yang hadir dalam FGD tersebut, yakni Kepala Pusat Riset Lingkungan Dan Teknologi Bersih Badan Riset Dan Inovasi Nasional RI Dr. Ario Betha Juanssilfero, M.Sc., Kepala Center For Sustainability And Waste Management Universitas Indonesia Prof. Dr. Ir. Mochamad Chalid, S.Si., M.Sc.Eng., dan Pendamping Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Pada Climate Reality Leadership Project Dr. Lyta Peratasari, S.Kom, M.Si.